

POTENSI DAN TANTANGAN JAWA TENGAH MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI 7 PERSEN

Pendahuluan

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mencapai 7 persen pada 2023. Untuk mencapai target tersebut, setiap potensi yang ada di Jawa Tengah perlu dioptimalkan. Salah satu potensi dari Jawa Tengah adalah berada di tengah pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang cukup strategis untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor jasa lainnya. Posisi yang ditengah ini akan mudah di *support* oleh provinsi sekitar seperti Jawa Barat, DIY serta Jawa Timur dan tentu saja dengan biaya transportasi yang lebih murah. Demikian juga, Jawa Tengah punya kesempatan yang lebih besar untuk mensupport kegiatan ekonomi di provinsi sekitarnya.

Selain mempunyai posisi strategis, Jawa Tengah juga berada pada jalur cincin api (*ring of fire*) dan memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Curah hujan dan kelembaban yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.024 – 3.624 mm atau 56 – 142 hari per tahun. Jawa Tengah juga memiliki 18 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi geografis ini menjadikan Jawa Tengah cukup subur untuk budidaya pertanian dan perkebunan. Kedaan geografis ini didukung dengan potensi penduduk Jawa Tengah sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat 34.718.204 orang pada tahun 2019.

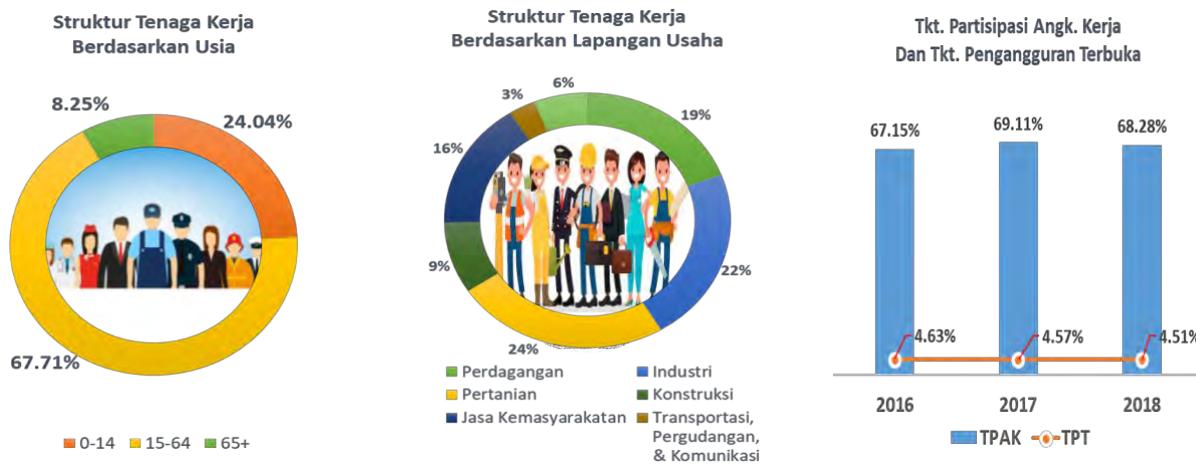
Potensi penduduk yang cukup besar didukung dengan keamanan yang kondusif mendorong ekonomi Jawa Tengah dari tahun 2014 – 2018 terus bergerak kearah positif. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir bertambah 0,11 persen dan bergerak melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Harga kebutuhan pokok melandai ke titik rendah dari inflasi tahun 2014 sebesar 8,22 persen menjadi 2,62 persen pada tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka berkurang 1,17 persen dibandingkan tahun 2014. Persentase penduduk miskin berkurang 2,39 persen pada periode yang sama, walaupun posisinya masih di atas kemiskinan nasional. Pencapaian investasi pun naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2014.

Dengan potensi yang dimiliki, Jawa Tengah berharap mampu mewujudkan visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Sebagai wujud percepatan untuk mewujudkan cita-cita di atas, Jawa Tengah berharap mampu mencapai pertumbuhan tujuh persen pada akhir tahun RPJMD. Namun demikian, bukan pekerjaan mudah untuk mencapai pertumbuhan tersebut karena dalam beberapa tahun belakangan ini Jawa Tengah hanya mampu tumbuh sekitar 5-6 persen. Ada sejumlah tantangan untuk menggapai pertumbuhan tujuh persen yang diharapkan.

Tantangan Pembangunan Ekonomi

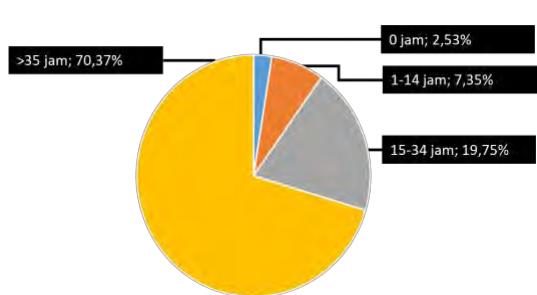
Pertama, tantangan demografi. Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 67,73 persen dan 32,27 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah telah mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat. Antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta strategi *link and match* antara kebutuhan pasar tenaga kerja. Keberhasilan maupun kegagalan dalam memanfaatkan potensi penduduk produktif akan memberi dampak pada besaran pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

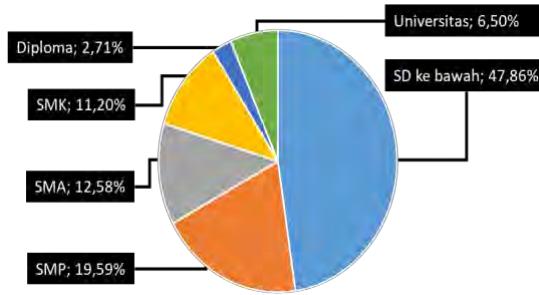


Jawa Tengah dihadapkan juga pada tantangan penyediaan lapangan kerja dan pergeseran struktur perekonomian. Pengangguran masih terkonsentrasi pada pengangguran terdidik. Menariknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kelompok yang berpendidikan rendah (SD atau tidak bersekolah), justru tercatat lebih rendah dibandingkan dengan TPT pada kedua kelompok lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018, TPT kelompok berpendidikan rendah ini tercatat sekitar 2 persen saja atau kurang dari separuh angka TPT provinsi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, meskipun dengan gaji/pendapatan yang juga tidak terlalu besar. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi yang bisa jadi, karena faktor pendidikan tersebut, membatasi diri menerima pekerjaan dengan cara memilih pekerjaan yang dirasa sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tamatkan. Akibatnya, tidak sedikit proporsi lulusan sekolah menengah dan sekolah tinggi yang tidak bekerja dan berstatus sebagai pengangguran. Jika Jawa Tengah mampu mengoptimalkan tenaga kerja terdidik ini dengan baik, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi dapat melonjak.

Tenaga kerja berdasarkan jumlah jam kerja



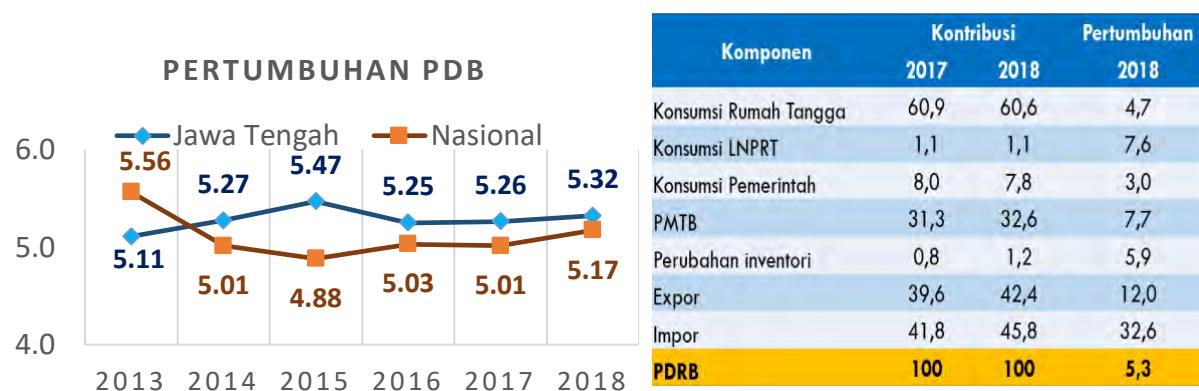
Tenaga kerja berdasarkan pendidikan



Dilihat lebih jauh, pekerja yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu sebanyak 70,37 persen dari total penduduk bekerja, sedangkan yang kurang dari itu 27,10 persen (1-34 jam). Jumlah jam kerja ini berpengaruh terhadap tingkat produktivitas maupun output yang dihasilkan. Dilihat dari pendidikan, mayoritas penduduk Jateng yang bekerja berpendidikan SD ke bawah (47,86%). Namun demikian, angka tersebut terus mengalami tren penurunan seiring dengan penurunan angka partisipasi kerja angkatan tua.

Kedua, trend pertumbuhan PDRB Jawa Tengah, tahun 2013 – 2018 cenderung meningkat dan berada di atas PDB Nasional. Namun demikian, selama periode tersebut tingkat pertumbuhan belum pernah melampaui enam persen. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai Jawa Tengah hanya mencapai 5,47 persen (2015).

Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB. Konsumsi makanan, minuman, transportasi dan komunikasi cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan peningkatan ekonomi rumah tangga di Jawa Tengah.



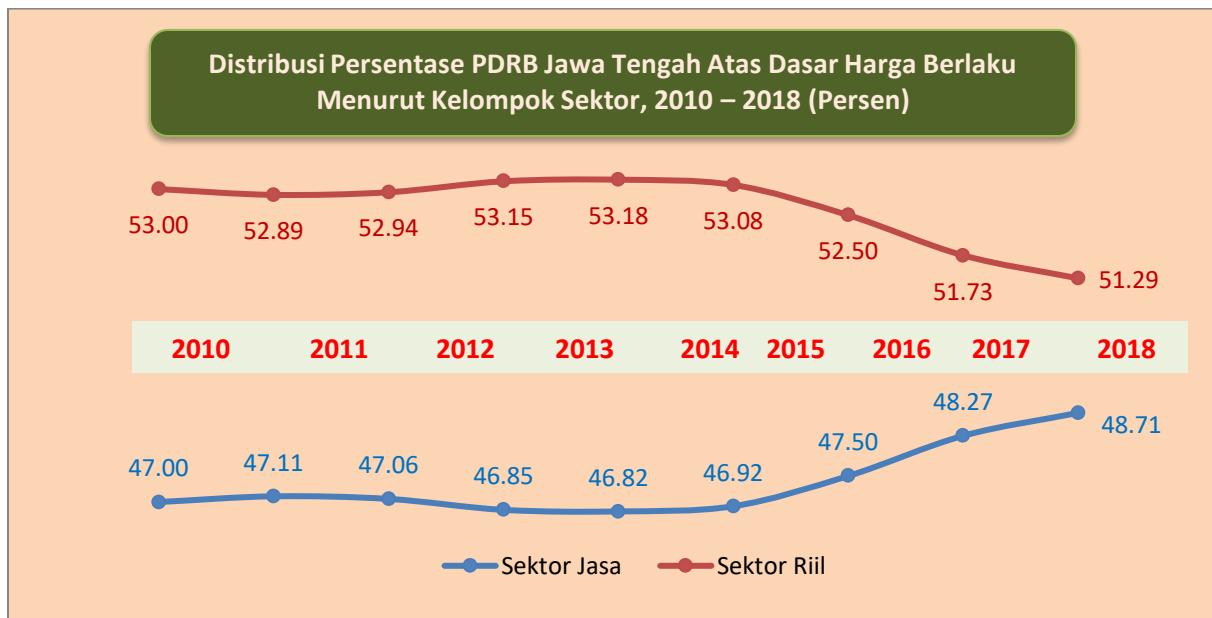
Investasi selama tahun 2018, realisasi investasi naik 14,49 persen dari tahun sebelumnya Rp 51,54 triliun. Investasi Jawa Tengah tumbuh pesat dan menempati peringkat 3 setelah DKI dan Jawa Barat. Pertumbuhan tersebut diikuti meningkatnya sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata dan ekspor.

Terdapat perbaikan investasi non-bangunan seiring dengan kuatnya impor barang modal, terutama berupa mesin untuk pembangunan PLTU. Investasi bangunan masih tumbuh cukup tinggi, karena keberlanjutan penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah. Karena masih dalam proses pembangunan, *multiplier effectnya* belum bisa dirasakan oleh Jawa Tengah. Sedangkan pertumbuhan sektor riil lainnya masih stagnan cenderung menurun.

Peranan sektor riil dalam perekonomian Jawa Tengah mulai melemah disebabkan penuaan pada alat-alat mesin, sebaliknya kecenderungan pertumbuhan ekonomi mulai beralih ke sektor jasa. Berkurangnya peranan sektor pertanian dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali dimaknai sebagai proses transformasi. Hal ini diawali dari perlambatan sektor pertanian, lalu industri dan lonjakan sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi sektor riil dalam sepuluh tahun terakhir terus melemah. Bahkan tahun 2018 pertumbuhan pertanian hanya 2,63 persen, pertambangan dan penggalian 2,45 persen dan industri pengolahan 4,35 persen. Angka ini di bawah angka rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 5,32 persen. Berbeda dengan sektor jasa, pertumbuhannya pesat mencapai 12,39 persen untuk sektor

Informasi dan komunikasi, disusul jasa perusahaan, jasa lainnya, penyedia akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan berkisar antara 8 – 9 persen.



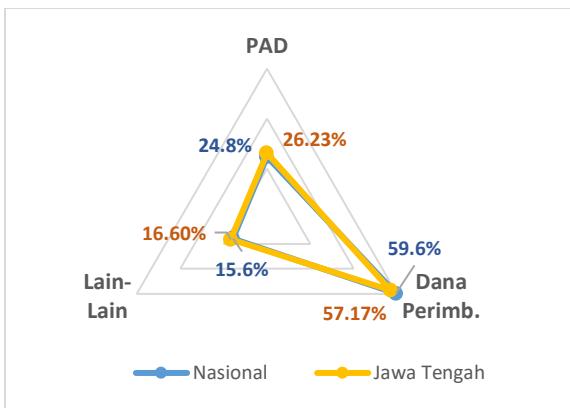
Selama tujuh tahun terakhir, komposisi kelompok sektor penyusun PDRB relatif sama. Pergeseran perubahan struktur ekonomi terjadi secara pelan namun pasti. Dulunya lapangan usaha pertanian menjadi andalan namun semakin tergeser. Demikian pula peran lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga semakin berkurang.

Sedangkan sektor riil cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018 peranan sektor jasa sebesar 48,71 persen. Meningkatnya sektor jasa ini seiring dengan gencarnya pengaruh destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Sehingga mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, penyediaan akomodasi, makan dan minum, transportasi dan informasi dan komunikasi. Ikut berkembang juga walaupun tumbuh pelan jasa keuangan, jasa pendidikan dan jasa lainnya.

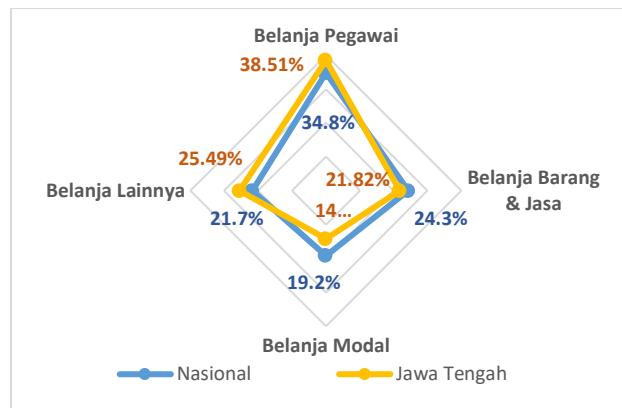
Tetapi pertumbuhan sektor jasa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena *share* ekonomi terhadap Jawa Tengah relatif kecil. Berbeda dengan sektor rill terutama industri dan pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tetapi pertumbuhannya kecil menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Jawa Tengah.

Ketiga, kondisi pengelolaan keuangan daerah. Secara agregat kemandirian fiskal daerah se-Jawa Tengah 57,2 persen (di bawah rata-rata nasional 59,6 persen). Namun porsi belanja pegawainya tinggi 38,5 persen (diatas rata-rata nasional 34,8 persen), sedangkan belanja modal hanya 21,8 persen (di bawah rata-rata Nasional 24,3 persen). Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, struktur belanja APBD perlu didorong ke arah yang lebih produktif, terutama ke belanja modal, termasuk juga belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah menjadi stimulus tumbuhnya produksi dunia usaha. Sementara belanja modal akan memberi multiplier effect untuk berkembangnya dunia usaha.

Perbandingan Struktur Pendapatan APBD 2019



Perbandingan Struktur Belanja APBD 2019



Kesimpulan

Potensi yang dimiliki Jawa Tengah juga sekaligus menjadi tantangan bagi Jawa Tengah. Potensi jika mampu dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif bagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, justru akan menjadi masalah bagi Jawa Tengah. Penduduk usia produktif yang melimpah, anggaran pemerintah daerah yang cukup banyak, struktur pengangguran yang mengelembung di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, adalah potensi yang sekaligus menjadi tantangan bagi Jawa Tengah. Butuh strategi dan pengelolaan yang pas sehingga semuanya dapat bersinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.